

**ANALISIS SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA TENTANG TINDAK  
PIDANA PENYELEWENGAN DANA DESA OLEH APARAT DESA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RYAS ROSYID**  
**NPM.19810419**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## **ABSTRAK**

**RYAS ROSYID. NPM.19810419.** 2023. *ANALISIS SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA TENTANG TINDAK PIDANA PENYELEWENGAN DANA DESA OLEH APARAT DESA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penyelewengan Dana Desa, Aparat Desa.*

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada UU No 6 tentang Desa tahun 2014 ayat (1). Adapun tanggung jawab kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa, yaitu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Peran kepala desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3.

Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa termasuk bagian dari tindak pidana korupsi dimasukkan yang masuk kategori tindak pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam satu wilayah. Maka dari itu Undang-Undang korupsi dan sistem peradilan sangat berbeda, serta adanya suatu lembaga khusus yang berperan penting dalam pemberantasan dalam tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi dalam hal ini penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Chazawi. 2014. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Alumni.
- Anggono, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UBPress.
- A., Djoko, Sumaryanto. 2009. *Pembalikkan Beban Pembuktian*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Agus, Kasiyanto. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Prenanda Media.
- Andi, Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggono, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aminuddin Ilmar, 2016, *Ruang Lingkup Tata Pemerintahan*, Pernadamedia Group, Jakarta
- Amirul Mukminin dkk, 2019, *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan*, UNY Press, Yogyakarta
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik, Dan Kritik*, Jakarta : Rajawali Pers
- Bambang, Waluyo. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Choirul Saleh et.al, 2020, *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintahan Daerah*, Refika Aditama, Bandung
- Didik G.Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Tata Aksara
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Evi, Hartanti. 2010. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hasbulla, F., Sjawie. 2015. *Pertanggung jawaban Korporasi di dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

- Huda , Ni'matul. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Kranianga, Hendra. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Ekonomi Perspektif Hukum Dan Politik*, Depok: Prenadamedia Group.
- Luthfia, Agusniar Rizka. 2013. *Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah*. Forum Studi Masyarakat dan Kebudayaan.
- Muluk, Khairul. 2006. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Marbun, S.F, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, PT.Raja Grafindo, Jakarta
- Muryanto, Marsudi, Firman 2020, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Bebas dari Korupsi*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 36-47
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang
- Nugroho, Rianto. 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi: Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lilik, Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahrus, Ali. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.